

Pelatihan edukasi budaya anti-korupsi partisipatif sebagai strategi penguatan akuntabilitas mahasiswa di perguruan tinggi

**Suriadi Ardiansyah¹, Novandi Firdaus Yusup², Opan Satria Mandala³, Yorman⁴, Muhammad Tahir⁵
Nurhafni⁶**

¹Pendidikan Kepeleatihan Olahraga, Fakultas Pendidikan, Universitas Bumigora, Indonesia

²Pendidikan Kepeleatihan Olahraga, Fakultas Pendidikan, Universitas Bumigora, Indonesia

³Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Humaniora, Hukum & Pariwisata, Universitas Bumigora, Indonesia

⁴Pendidikan Teknologi Informasi, Fakultas Pendidikan, Universitas Bumigora, Indonesia

⁵Sistem Informasi, Fakultas Teknik, Universitas Bumigora, Indonesia

⁶Pendidikan Kepeleatihan Olahraga, Fakultas Pendidikan, Universitas Bumigora, Indonesia

Penulis korespondensi: Suriadi Ardiansyah

E-mail : suriadi@universitasbumigora.ac.id

Diterima: 21 Januari 2026 | Disetujui: 04 April 2026 | Online: 28 April 2026

© Penulis 2026

Abstrak

Praktik korupsi di lingkungan perguruan tinggi masih menjadi tantangan serius dalam mewujudkan tata kelola kampus yang berintegritas, mengingat perguruan tinggi merupakan ruang strategis dalam pembentukan karakter generasi muda. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan program edukasi budaya anti-korupsi berbasis pembelajaran partisipatif sebagai upaya penguatan sikap akuntabilitas mahasiswa. Mitra sasaran kegiatan adalah mahasiswa dari tiga fakultas di perguruan tinggi, dengan jumlah peserta sebanyak 120 orang yang dipilih secara purposif. Metode pelaksanaan kegiatan berupa pelatihan dan pendampingan edukatif yang dilaksanakan selama delapan minggu melalui pendekatan participatory learning, meliputi penyampaian materi konseptual, studi kasus kontekstual, diskusi reflektif, simulasi pengambilan keputusan etis, serta refleksi individu. Evaluasi kegiatan dilakukan melalui pengukuran sikap akuntabilitas sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan menggunakan instrumen yang telah tervalidasi. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan skor rata-rata sikap akuntabilitas mahasiswa dari 3,42 pada tahap awal menjadi 4,15 pada tahap akhir (skala 5), dengan selisih peningkatan sebesar 0,73 poin yang signifikan secara statistik ($p < 0,01$). Peningkatan terjadi pada indikator kejujuran, tanggung jawab, transparansi, dan keberanian melapor. Temuan ini menunjukkan bahwa kegiatan edukasi budaya anti-korupsi berbasis pembelajaran partisipatif efektif dalam memperkuat akuntabilitas mahasiswa serta mendukung pengembangan budaya integritas dan tata kelola kampus yang baik.

Kata kunci: edukasi anti-korupsi; akuntabilitas; gratifikasi; participatory learning; perguruan tinggi.

Abstract

Corrupt practices in the university environment are still a serious challenge in realizing campus governance with integrity, considering that universities are strategic spaces in the formation of the character of the younger generation. This community service activity aims to develop and implement an anti-corruption cultural education program based on participatory learning as an effort to strengthen student accountability attitudes. The target partners of the activity were students from three faculties at universities, with a total of 120 participants who were selected purposively. The method of implementing activities in the form of training and educational assistance which was carried out for eight weeks through a participatory learning approach, included the delivery of conceptual materials, contextual case studies, reflective discussions, simulations of ethical decision-making, and individual

reflection. Evaluation of activities is carried out through the measurement of accountability attitudes before and after the implementation of activities using validated instruments. The results showed an increase in the average score of student accountability attitudes from 3.42 in the initial stage to 4.15 in the final stage (scale 5), with a difference of 0.73 points in a statistically significant increase ($p < 0.01$). An increase occurred in the indicators of honesty, responsibility, transparency, and courage to report. These findings show that participatory learning-based anti-corruption culture education activities are effective in strengthening student accountability and supporting the development of a culture of integrity and good campus governance.

Keywords: anti-corruption education; accountability; gratuities; participatory learning; colleges.

PENDAHULUAN

Korupsi di lingkungan perguruan tinggi tidak hanya merusak kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan, tetapi juga menghambat pencapaian tujuan akademik berupa penciptaan generasi yang berintegritas. Praktik gratifikasi, suap, dan penyalahgunaan wewenang sering kali terjadi secara terselubung, terutama dalam proses administrasi, penerimaan beasiswa, serta pelaksanaan penelitian (Nyoman & Permatasari, 2022; Suhandi & Agustin, 2023). Fenomena ini mencerminkan keganjilan nilai akuntabilitas yang seharusnya menjadi pilar utama budaya kampus. Meskipun berbagai regulasi dan program sosialisasi anti-korupsi telah diterapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, sebagian besar inisiatif masih bersifat informatif dan kurang menekankan pada pembentukan sikap kritis serta partisipasi aktif mahasiswa. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pendekatan pembelajaran yang bersifat pasif menghasilkan perubahan sikap yang terbatas (Aksinudin et al., 2022; Karini, 2022). Oleh karena itu, diperlukan strategi edukasi yang tidak hanya menyampaikan pengetahuan, melainkan menstimulasi proses refleksi, diskusi, dan simulasi situasi nyata sehingga mahasiswa dapat menginternalisasi nilai anti-korupsi dan akuntabilitas.

Korupsi di lingkungan perguruan tinggi juga menjadi salah satu isu strategis yang mengancam integritas institusi pendidikan tinggi. Sebagai pusat produksi ilmu pengetahuan, kampus idealnya menjadi ruang yang bersih, transparan, dan berorientasi pada etika. Namun, berbagai laporan menunjukkan bahwa praktik korupsi masih terjadi dalam bentuk penyalahgunaan fasilitas, suap administratif, hingga perilaku manipulatif dalam proses akademik. Fenomena ini bukan hanya menodai citra institusi, tetapi juga menghambat pembentukan karakter mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa (Afandi et al., 2025).

Berbagai bentuk korupsi seperti gratifikasi, suap, serta penyalahgunaan wewenang kerap muncul secara terselubung dalam proses administratif, penerimaan beasiswa, dan pengelolaan penelitian (Made & Dwi, 2022; Nyoman & Permatasari, 2022). Situasi ini memperlihatkan adanya deviasi nilai akuntabilitas yang seharusnya menjadi basis moral bagi setiap sivitas akademika. Ketika proses-proses akademik tidak lagi berjalan secara jujur dan transparan, kepercayaan publik terhadap perguruan tinggi akan melemah dan merusak legitimasi institusional. Pada sisi lain, regulasi serta program pencegahan korupsi sebenarnya telah banyak diinisiasi oleh pemerintah, termasuk Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Akan tetapi, sebagian besar program masih bersifat sosialisasi informatif, yang hanya menekankan pemahaman teoretis mengenai definisi, bentuk, dan dampak korupsi. Pendekatan ini sering kali tidak memadai dalam menumbuhkan kesadaran kritis maupun keberanian moral untuk menolak praktik-praktik menyimpang.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pendekatan edukasi yang pasif tidak cukup efektif dalam mengubah sikap mahasiswa secara signifikan. (Pusvitasari et al., 2024) mencatat bahwa mahasiswa cenderung hanya mengingat materi, tanpa mampu menerjemahkannya ke dalam perilaku nyata ketika berhadapan dengan dilema etis. Hal ini mempertegas urgensi metode pembelajaran yang lebih partisipatif dan berorientasi pada pengalaman nyata. Dalam konteks tersebut, dibutuhkan strategi pedagogis yang bukan hanya menyampaikan pengetahuan, tetapi juga melibatkan mahasiswa dalam proses refleksi etis, diskusi kritis, dan simulasi situasi dilematis. Ketika mahasiswa diberi ruang

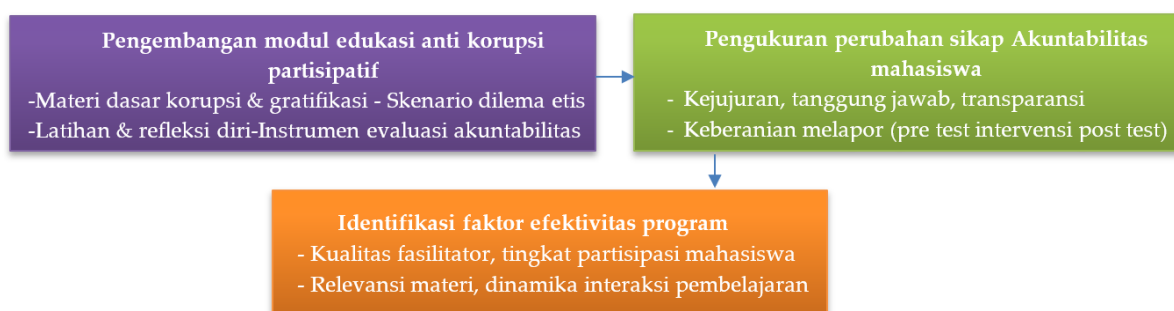
untuk menganalisis kasus nyata, menguji keputusan, serta mengevaluasi konsekuensi moral, mereka lebih mampu menginternalisasi nilai akuntabilitas dalam kehidupan akademik maupun sosial.

Program edukasi budaya anti-korupsi berbasis *participatory learning* menjadi salah satu pendekatan yang relevan untuk menjawab kebutuhan tersebut. Metode ini mencakup penggunaan studi kasus, *role-play*, diskusi kelompok, dan pengembangan sistem pelaporan anonim sebagai bagian dari upaya membangun budaya transparan. Pendekatan ini dirancang agar mahasiswa tidak hanya memahami konsep, tetapi juga merasakan pengalaman praktis dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini dilaksanakan pada tiga fakultas dalam satu universitas negeri di Indonesia dengan melibatkan 120 mahasiswa sebagai peserta. Program berlangsung selama delapan minggu dan dirancang untuk mendorong partisipasi aktif peserta dalam setiap sesi. Mahasiswa dilibatkan dalam analisis kasus korupsi yang relevan dengan lingkungan kampus, sehingga mereka dapat memetakan masalah nyata dan mengevaluasi potensi penyelesaian (Butarbutar, 2022).

Untuk memperjelas arah penelitian dan memberikan gambaran sistematis mengenai fokus intervensi yang dilakukan, tujuan penelitian ini dirumuskan ke dalam tiga komponen utama. Ketiga tujuan tersebut saling berkaitan dan dirancang untuk memastikan bahwa pengembangan program edukasi anti-korupsi tidak hanya menghasilkan modul yang relevan, tetapi juga mampu memberikan dampak terukur terhadap sikap akuntabilitas mahasiswa.

Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan modul edukasi anti-korupsi yang komprehensif dan kontekstual, berbasis pada prinsip pembelajaran partisipatif. Modul tidak hanya berisi pengetahuan dasar tentang korupsi, tetapi juga perangkat latihan, skenario dilema etis, dan instrumen evaluasi diri terkait akuntabilitas. Mengukur perubahan sikap akuntabilitas mahasiswa sebelum dan sesudah mengikuti intervensi. Instrumen pengukuran disusun berdasarkan indikator akuntabilitas yang telah tervalidasi, meliputi kejujuran, tanggung jawab, transparansi, dan keberanian melapor. Proses evaluasi ini penting untuk mengetahui sejauh mana program mampu memberikan dampak nyata. Mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas program, termasuk kualitas fasilitator, tingkat partisipasi mahasiswa, dan relevansi materi dengan pengalaman mereka sehari-hari. Analisis faktor ini diperlukan untuk memastikan program dapat direplikasi dan dikembangkan lebih lanjut.

Bagan berikut menyajikan ringkasan ketiga tujuan penelitian tersebut secara lebih terstruktur dan mudah dipahami. Bagan ini menyajikan alur integratif tiga tujuan penelitian dalam program edukasi budaya anti-korupsi berbasis partisipatif. Alur ini menunjukkan bahwa penelitian tidak hanya berfokus pada pengembangan modul sebagai produk, tetapi juga pada pengukuran dampak sikap akuntabilitas serta analisis faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas program. Dengan demikian, ketiga tujuan membentuk satu kesatuan strategis yang saling berkelindan dalam proses pengabdian.



Gambar 1. Bagan alur integratif tujuan penelitian dalam program edukasi budaya anti-korupsi berbasis partisipatif

METODE

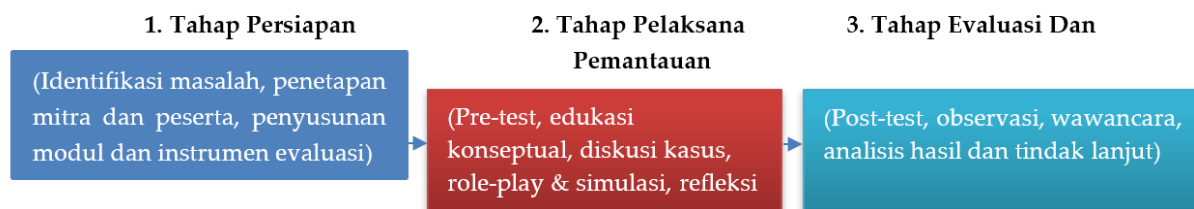
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada bulan Desember 2025 bertempat di lingkungan Universitas Bumigora dengan sasaran mitra berupa mahasiswa program sarjana dari Fakultas Pendidikan, Teknik, Humaniora–Hukum, dan Pariwisata. Mitra sasaran berjumlah 120

Pelatihan edukasi budaya anti-korupsi partisipatif sebagai strategi penguatan akuntabilitas mahasiswa di perguruan tinggi

mahasiswa, yang dipilih secara purposif dengan kriteria telah menempuh minimal satu semester dan belum pernah mengikuti pelatihan formal terkait pendidikan anti-korupsi.

Metode pelaksanaan kegiatan dirancang dalam bentuk pelatihan dan pendampingan edukatif berbasis *participatory learning* yang menekankan keterlibatan aktif peserta, dialog reflektif, dan pengalaman langsung dalam internalisasi nilai integritas, akuntabilitas, dan tanggung jawab sosial (Kolb, 1984). Kegiatan dilaksanakan selama delapan minggu melalui delapan sesi pelatihan (masing-masing 90 menit), yang mencakup penyampaian materi konseptual tentang korupsi dan gratifikasi, studi kasus kontekstual di lingkungan akademik, diskusi kelompok terfokus, *role-play* dan simulasi pengambilan keputusan etis, serta refleksi individu secara terstruktur.

Untuk memastikan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berjalan secara sistematis dan terukur, kegiatan edukasi budaya anti-korupsi berbasis pembelajaran partisipatif ini dirancang melalui tahapan yang terstruktur (OECD, 2018). Tahapan kegiatan mencakup proses persiapan, pelaksanaan, serta evaluasi dan pemantauan, yang saling berkelindan untuk menjamin ketercapaian tujuan program. Setiap tahap disusun dengan mempertimbangkan karakteristik mitra sasaran, konteks permasalahan yang dihadapi, serta prinsip pembelajaran partisipatif yang menekankan keterlibatan aktif mahasiswa dalam internalisasi nilai akuntabilitas dan integritas. Alur pelaksanaan kegiatan secara ringkas disajikan pada gambar berikut.



Gambar 2. Tahapan pelaksanaan kegiatan edukasi budaya anti-korupsi berbasis pembelajaran partisipatif

Berdasarkan diagram tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat tersebut, program edukasi budaya anti-korupsi dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan melalui tiga fase utama yang saling terintegrasi. Tahap persiapan difokuskan pada identifikasi permasalahan utama terkait rendahnya sikap akuntabilitas mahasiswa, penetapan mitra dan peserta sasaran, serta penyusunan modul edukasi dan instrumen evaluasi yang relevan dengan konteks kehidupan akademik. Tahap ini menjadi fondasi penting untuk memastikan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat dirancang sesuai kebutuhan nyata mitra dan tujuan penguatan budaya integritas di perguruan tinggi.

Tahap pelaksanaan merupakan inti kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang menekankan pembelajaran partisipatif melalui kombinasi pre-test, edukasi konseptual, diskusi studi kasus, role-play, simulasi dilema etis, dan refleksi individu terstruktur. Pendekatan ini dirancang untuk mendorong keterlibatan aktif mahasiswa, memperkuat kesadaran kritis, serta memfasilitasi internalisasi nilai akuntabilitas secara reflektif dan kontekstual. Seluruh rangkaian kegiatan diarahkan tidak hanya pada peningkatan pemahaman normatif, tetapi juga pada pembentukan sikap dan komitmen moral mahasiswa terhadap nilai anti-korupsi (Afandi et al., 2025).

Tahap evaluasi dan pemantauan dilakukan melalui post-test, observasi partisipasi, serta wawancara reflektif guna menilai capaian dan dampak kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara komprehensif. Hasil evaluasi selanjutnya dianalisis sebagai dasar penyusunan tindak lanjut, khususnya dalam upaya penguatan budaya integritas dan tata kelola kampus yang berkelanjutan. Dengan demikian, pelaksanaan PkM ini tidak berhenti pada kegiatan sesaat, melainkan berorientasi pada perubahan sikap dan pembentukan ekosistem akademik yang berintegritas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peningkatan signifikan skor sikap akuntabilitas mahasiswa setelah mengikuti pelatihan edukasi budaya anti-korupsi berbasis *participatory learning* menegaskan efektivitas pendekatan pembelajaran partisipatif dalam membangun kesadaran etis dan tanggung jawab sosial. Kenaikan skor rata-rata KSA dari 3,42 menjadi 4,15 dengan *effect size* yang besar ($d = 1,38$) menunjukkan bahwa intervensi tidak hanya berdampak secara statistik, tetapi juga bermakna secara substantif. Temuan ini menguatkan hasil penelitian Purvitasari et al., (2024) dan Irsyadi et al., (2024) yang menegaskan bahwa pembelajaran anti-korupsi berbasis dialog, studi kasus, dan pengalaman langsung mampu memperkuat internalisasi nilai integritas melalui keterlibatan aktif mahasiswa dalam refleksi moral dan pengambilan keputusan etis. Meskipun demikian, hasil penelitian ini perlu ditempatkan secara kritis dengan mempertimbangkan temuan Witarsa (2023) yang menunjukkan bahwa pelatihan anti-korupsi berdurasi singkat cenderung menghasilkan perubahan sikap yang bersifat temporer. Perbedaan ini mengindikasikan bahwa durasi intervensi, kedalaman materi, dan intensitas partisipasi menjadi faktor penentu keberlanjutan dampak pembelajaran. Dalam konteks penelitian ini, keterlibatan mahasiswa dalam diskusi reflektif, *role-play*, dan simulasi dilema etis tampak menciptakan pengalaman belajar yang lebih transformatif dibandingkan pendekatan informatif semata, sehingga mampu mereduksi risiko reduksi nilai akibat tekanan lingkungan sosial.

Analisis regresi menunjukkan bahwa tingkat partisipasi mahasiswa merupakan prediktor utama perubahan sikap akuntabilitas ($\beta = 0,28$; $p < 0,001$), sementara variabel demografis seperti jenis kelamin dan afiliasi fakultas tidak berpengaruh signifikan. Temuan ini menguatkan kerangka *experiential learning* Kolb (1984) yang menekankan bahwa pembelajaran berbasis pengalaman dan refleksi personal memiliki daya transformasi yang lebih kuat dibandingkan pembelajaran pasif. Pandangan ini juga selaras dengan Lickona (2019) yang menegaskan bahwa pendidikan karakter yang efektif harus mengintegrasikan dimensi kognitif, afektif, dan perilaku secara simultan agar nilai-nilai moral terinternalisasi secara mendalam dan berkelanjutan. Namun, sejalan dengan peringatan (Krettenauer, 2022), peningkatan sikap moral tidak selalu berbanding lurus dengan perubahan perilaku nyata, terutama ketika individu dihadapkan pada tekanan kelompok atau relasi kuasa. Temuan kualitatif yang menunjukkan bahwa *role-play* membantu mahasiswa memahami konsekuensi gratifikasi serta meningkatnya rasa aman terhadap sistem pelaporan anonim memperkuat argumen Hayati et al., (2025) serta Aksinudin (2022) mengenai pentingnya iklim etis dan dukungan institusional. Akan tetapi, sebagaimana dikritisi oleh Arifiyanti et al., (2022).

Efektivitas mekanisme pelaporan sangat bergantung pada kepercayaan terhadap pimpinan dan konsistensi budaya organisasi. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menegaskan bahwa pendidikan anti-korupsi berbasis partisipatif efektif membangun sikap kritis dan akuntabilitas mahasiswa, namun dampak jangka panjangnya mensyaratkan integrasi berkelanjutan dalam budaya dan tata kelola institusi perguruan tinggi, bukan sekadar intervensi pedagogis sesaat. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap perubahan sikap akuntabilitas mahasiswa setelah intervensi edukasi budaya anti-korupsi, penelitian ini menggunakan analisis regresi linier. Analisis ini dilakukan dengan memasukkan tingkat partisipasi mahasiswa, jenis kelamin, dan afiliasi fakultas sebagai variabel prediktor, guna mengetahui pengaruh relatif masing-masing variabel terhadap peningkatan sikap akuntabilitas pasca-intervensi. Hasil analisis regresi tersebut disajikan secara ringkas pada tabel berikut;

Tabel 1. Hasil Analisis Regresi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perubahan Sikap Akuntabilitas Mahasiswa

No	Variabel Independen	Koefisien Regresi (β)	Nilai p	Signifikansi Statistik	Interpretasi Akademik	Landasan Teoretis
1	Tingkat Partisipasi	0,28	< 0,001	Signifikan	Partisipasi berperan sebagai prediktor	Experiential Learning (Kolb, 1984)

Pelatihan edukasi budaya anti-korupsi partisipatif sebagai strategi penguatan akuntabilitas mahasiswa di perguruan tinggi

No	Variabel Independen	Koefisien Regresi (β)	Nilai p	Signifikansi Statistik	Interpretasi Akademik	Landasan Teoretis
					perubahan sikap akuntabilitas; semakin tinggi keterlibatan mahasiswa, semakin kuat internalisasi nilai akuntabilitas.	Pendidikan Karakter (Lickona, 2019) 2013)
2	Jenis Kelamin	Tidak signifikan	> 0,05	Tidak signifika	Tidak terdapat perbedaan bermakna perubahan sikap akuntabilitas berdasarkan jenis kelamin.	Equality in Moral Development (Carr, 2023)
3	Fakultas	Tidak signifikan	> 0,05	Tidak signifika	Latar belakang disiplin ilmu tidak memengaruhi perubahan sikap secara signifikan, menunjukkan universalitas intervensi nilai.	Civic Education as Cross-Disciplinary Value (UNESCO, 2021)

Sumber: Data primer diolah tim pengabdian (2026)

Berdasarkan hasil analisis regresi pada Tabel. 1, tingkat partisipasi mahasiswa terbukti sebagai prediktor paling signifikan terhadap perubahan sikap akuntabilitas ($\beta = 0,28$; $p < 0,001$). Temuan ini menegaskan bahwa keterlibatan aktif mahasiswa dalam diskusi reflektif, analisis kasus, dan pemecahan dilema etis berperan krusial dalam proses internalisasi nilai akuntabilitas. Hasil ini sejalan dengan teori experiential learning Kolb (1984) yang menekankan bahwa pembelajaran berbasis pengalaman langsung dan refleksi personal memiliki daya transformasi yang lebih kuat dibandingkan pendekatan pembelajaran pasif atau informatif semata.

Sebaliknya, variabel demografis seperti jenis kelamin dan afiliasi fakultas tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap perubahan sikap akuntabilitas. Ketidaksignifikanan ini mengindikasikan bahwa nilai-nilai akuntabilitas bersifat lintas disiplin dan relatif universal, serta lebih ditentukan oleh kualitas pengalaman belajar daripada karakteristik individual. Temuan ini mendukung kerangka perkembangan moral Carr (2023) dan pandangan Lickona (2019) yang menegaskan bahwa pendidikan karakter yang efektif harus mengintegrasikan dimensi kognitif, afektif, dan perilaku secara simultan agar nilai moral dapat terinternalisasi secara mendalam dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan anti-korupsi di perguruan tinggi sangat bergantung pada desain pembelajaran yang mendorong partisipasi aktif mahasiswa. Pelaksanaan pelatihan edukasi budaya anti-korupsi berbasis pembelajaran partisipatif tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer nilai normatif, tetapi sebagai proses transformasi etis yang menempatkan mahasiswa sebagai subjek pembelajaran. Implikasi temuan ini menegaskan pentingnya penguatan strategi pedagogis dialogis dan reflektif sebagai fondasi utama dalam membangun budaya akuntabilitas dan integritas akademik yang berkelanjutan di lingkungan kampus. Gambar 3 merepresentasikan implementasi pelatihan edukasi budaya anti-korupsi melalui pendekatan pembelajaran partisipatif yang berorientasi pada internalisasi nilai integritas dan akuntabilitas mahasiswa.



Gambar 3. Dokumentasi Pelaksanaan Pelatihan Edukasi Budaya Anti-Korupsi Berbasis Partisipatif

Gambar 3 tersebut menampilkan suasana pelaksanaan pelatihan yang berlangsung secara partisipatif dan kolaboratif, ditandai dengan keterlibatan aktif mahasiswa dalam setiap sesi kegiatan. Interaksi antara fasilitator dan peserta berlangsung secara dialogis, mencerminkan terciptanya ruang belajar yang inklusif dan reflektif. Kondisi ini memungkinkan mahasiswa untuk mengemukakan pandangan kritis, mengajukan pertanyaan, serta merefleksikan dilema etis yang muncul dalam berbagai studi kasus yang dibahas. Dokumentasi ini sekaligus menunjukkan bahwa pelatihan tidak bersifat satu arah, melainkan berorientasi pada pembentukan kesadaran kolektif dan internalisasi nilai akuntabilitas. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan sebagaimana tergambar memperkuat tujuan program pengabdian, yakni menumbuhkan budaya integritas dan sikap anti-korupsi yang berkelanjutan di lingkungan perguruan tinggi.

Pengembangan Modul Edukasi Anti-Korupsi Partisipatif

Pengembangan modul edukasi anti-korupsi berbasis pembelajaran partisipatif menghasilkan desain pedagogis yang bersifat transformatif, dengan mengintegrasikan prinsip *experiential learning*

Pelatihan edukasi budaya anti-korupsi partisipatif sebagai strategi penguatan akuntabilitas mahasiswa di perguruan tinggi

(Kolb, 1984) dialog reflektif (Freire, 1970), dan pembelajaran kontekstual. Modul ini dirancang untuk membawa mahasiswa pada pengalaman langsung menghadapi dilema etis, merefleksikannya secara kritis, serta memaknai nilai akuntabilitas dalam konteks kehidupan akademik. Temuan ini menegaskan bahwa pendidikan anti-korupsi yang efektif tidak cukup berorientasi pada transfer pengetahuan normatif, melainkan harus berakar pada pengalaman nyata dan keterlibatan aktif peserta didik.

Secara substantif, modul mencerminkan pergeseran paradigma dari pendekatan instruksional menuju pendekatan emansipatoris, dengan memposisikan mahasiswa sebagai subjek pembelajar yang membangun makna secara otonom. Integrasi diskusi kritis, role-play, dan simulasi pengambilan keputusan etis terbukti meningkatkan keterlibatan kognitif dan afektif mahasiswa, sekaligus memperkuat internalisasi nilai integritas dan akuntabilitas. Pendekatan ini selaras dengan pedagogi kritis dan teori andragogi yang menekankan relevansi pengalaman belajar dengan realitas sosial mahasiswa, sehingga nilai etika publik dipahami secara reflektif dan kontekstual.

Dari perspektif pedagogis, kualitas modul tercermin pada koherensi antara tujuan pembelajaran, materi, aktivitas, dan evaluasi yang disusun secara sistematis dan progresif. Respons positif mahasiswa menunjukkan bahwa pengalaman belajar yang dialogis dan reflektif lebih efektif dalam membangun kesadaran etis dibandingkan pendekatan ceramah normatif. Dengan demikian, modul ini tidak hanya berfungsi sebagai perangkat pembelajaran, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam pembentukan budaya akademik yang berintegritas dan berkelanjutan di lingkungan perguruan tinggi.

Tabel 2. Struktur modul edukasi anti-korupsi partisipatif

Komponen	Deskripsi	Landasan Teoretik
Materi Konseptual	Pengertian korupsi, bentuk, dampak	Hayati (2025), OECD (2018)
Skenario Dilema Etis	Kasus gratifikasi, manipulasi nilai, nepotisme	Aksinudin et al., (2022)
Diskusi Kelompok	Analisis kritis dan dialog reflektif	Freire (1970)
Role-Play/Simulasi	Pengambilan keputusan etis	Kolb (1984)
Refleksi Individu	Jurnal reflektif nilai	Lickona (2019)
Evaluasi Diri	Instrumen akuntabilitas	Berkowitz et al. (2020)

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2, struktur modul dirancang secara integratif untuk menjamin kesinambungan antara pemahaman konseptual, pengalaman etis, dan refleksi nilai. Materi konseptual berfungsi sebagai fondasi kognitif yang memperkenalkan konsep dan dampak korupsi, yang selanjutnya diperdalam melalui dilema etis kontekstual seperti gratifikasi, manipulasi nilai, dan nepotisme. Diskusi reflektif menjadi ruang deliberatif bagi mahasiswa untuk menguji argumentasi moral secara kritis, sementara role-play dan simulasi memberikan pengalaman langsung dalam pengambilan keputusan etis. Proses ini diperkuat melalui refleksi individu dan evaluasi diri berbasis akuntabilitas, sehingga modul berfungsi tidak hanya sebagai bahan ajar, tetapi sebagai medium transformasi nilai yang sistematis dan berkelanjutan.

Dalam tahap pelaksanaan, diskusi kelompok diterapkan sebagai metode utama untuk membangun ruang belajar yang dialogis dan partisipatif. Diskusi berbasis studi kasus nyata di lingkungan akademik memungkinkan mahasiswa mengaitkan konsep anti-korupsi dengan realitas sosial yang mereka hadapi. Melalui interaksi kritis antarpeserta, nilai-nilai akuntabilitas, kejujuran, dan tanggung jawab sosial dikonstruksi secara kolektif, menegaskan peran pembelajaran partisipatif dalam memperkuat internalisasi nilai etika publik.



Gambar 4. Diskusi kelompok mahasiswa dalam pelatihan edukasi budaya anti-korupsi berbasis pembelajaran partisipatif.

Sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4, keterlibatan aktif mahasiswa dalam diskusi kelompok menjadi indikator penting keberhasilan pendekatan yang digunakan. Dinamika dialog yang terbentuk tidak hanya mendorong keberanian mahasiswa dalam mengemukakan pendapat, tetapi juga memfasilitasi proses refleksi etis melalui konfrontasi ide, pengalaman, dan nilai personal. Proses ini berkontribusi langsung terhadap peningkatan sikap akuntabilitas mahasiswa, khususnya pada aspek transparansi dan keberanian melapor, sebagaimana tercermin dalam hasil post-test. Dengan demikian, diskusi kelompok berfungsi sebagai medium transformasi nilai yang menjembatani pemahaman kognitif dengan kesadaran moral dan komitmen perilaku etis, sekaligus menegaskan efektivitas pembelajaran partisipatif dalam konteks edukasi budaya anti-korupsi di lingkungan perguruan tinggi.

Pengukuran Perubahan Sikap Akuntabilitas Mahasiswa

Hasil pengukuran pre-test dan post-test menunjukkan peningkatan signifikan pada seluruh indikator sikap akuntabilitas, meliputi kejujuran, tanggung jawab, transparansi, dan keberanian melapor. Peningkatan ini merefleksikan pergeseran orientasi nilai mahasiswa dari sikap pasif-normatif

Pelatihan edukasi budaya anti-korupsi partisipatif sebagai strategi penguatan akuntabilitas mahasiswa di perguruan tinggi

menuju kesadaran etis yang lebih reflektif dan internal. Sejalan dengan *Theory of Planned Behavior* (Ajzen & Fishbein, 1975; Ramadhan, 2020), perubahan sikap ini merupakan prasyarat penting bagi terbentuknya intensi dan perilaku etis, sekaligus menegaskan bahwa intervensi pembelajaran partisipatif tidak berhenti pada ranah kognitif, tetapi menyentuh dimensi afektif dan konatif mahasiswa.

Secara kuantitatif, lonjakan skor pasca-intervensi mengindikasikan efektivitas pendekatan partisipatif dalam memfasilitasi internalisasi nilai. Temuan ini konsisten dengan model perkembangan moral Carr (2023) yang menekankan bahwa pembelajaran berbasis dilema etis lebih mampu mendorong penalaran moral dibandingkan pendekatan normatif satu arah. Melalui diskusi reflektif dan simulasi etis, mahasiswa terdorong untuk melakukan penilaian moral secara aktif, sehingga terjadi pergeseran dari moralitas berbasis kepatuhan menuju moralitas berbasis prinsip. Dari perspektif psikologi pendidikan, proses ini juga dapat dijelaskan melalui mekanisme disonansi kognitif (Hadi, 2011; Keng et al., 2011), di mana refleksi terstruktur memfasilitasi rekonstruksi sikap agar selaras dengan nilai integritas.

Peningkatan paling strategis terlihat pada indikator keberanian melapor, yang menunjukkan melemahnya budaya diam (*culture of silence*) yang kerap menghambat praktik etis di lingkungan akademik (Cerah et al., 2025; Hidayah & Kuswandi, 2024). Mahasiswa mulai memandang pelaporan sebagai tanggung jawab moral yang legitimate secara sosial, mencerminkan pergeseran norma subjektif dalam kelompok belajar (Reddy, 2023). Meskipun demikian, perubahan sikap ini perlu didukung oleh penguatan budaya institusional agar berkelanjutan, mengingat habitus etis dibentuk oleh struktur sosial yang relatif stabil (Tsoraya et al., 2023). Dengan demikian, temuan ini menegaskan potensi transformatif pendidikan anti-korupsi berbasis partisipatif sebagai fondasi awal pembentukan budaya akademik yang berintegritas, sejalan dengan agenda pendidikan global UNESCO (Tang, 2015; UNESCO, 2024).

Tabel 3. Perbandingan Skor Sikap Akuntabilitas

Indikator	Pre-Test (M)	Post-Test (M)	Δ (Post-Pre)
Kejujuran	3.1	4.2	+1.1
Tanggung Jawab	3.0	4.1	+1.1
Transparansi	2.9	4.0	+1.1
Keberanian Melapor	2.5	3.9	+1.4

Sumber: Data primer diolah oleh tim pengabdian (2026)

Sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 3 hasil pengukuran memperlihatkan peningkatan yang konsisten dan substansial pada seluruh indikator sikap akuntabilitas setelah pelaksanaan program edukasi anti-korupsi. Peningkatan skor rata-rata pada indikator kejujuran, tanggung jawab, dan transparansi masing-masing mencapai $\Delta = +1,1$, yang mengindikasikan terjadinya penguatan sikap etis yang relatif merata. Temuan yang paling menonjol terlihat pada indikator keberanian melapor, yang mengalami peningkatan tertinggi ($\Delta = +1,4$), menandakan adanya pergeseran signifikan dalam dimensi sikap yang selama ini dianggap paling sulit dibentuk karena berkaitan dengan risiko sosial dan psikologis. Secara keseluruhan, pola peningkatan ini menunjukkan bahwa intervensi tidak hanya berdampak pada aspek kognitif pemahaman tentang akuntabilitas, tetapi juga menyentuh dimensi afektif dan disposisional mahasiswa. Dengan demikian, tabel ini memberikan bukti empiris bahwa pendekatan pembelajaran partisipatif mampu memfasilitasi internalisasi nilai akuntabilitas secara lebih mendalam dan bermakna.

Identifikasi Faktor-Faktor Penentu Efektivitas Program edukasi budaya anti-korupsi

Efektivitas program edukasi budaya anti-korupsi tidak ditentukan oleh satu faktor tunggal, melainkan oleh interaksi sinergis antara kualitas fasilitator, tingkat partisipasi mahasiswa, dan relevansi materi pembelajaran. Ketiga faktor ini membentuk ekosistem pedagogis yang saling

memperkuat, di mana kelemahan pada satu elemen berpotensi melemahkan proses internalisasi nilai secara keseluruhan. Temuan ini sejalan dengan *educational effectiveness model* (Creemers, B. P. M., & Kyriakides, 2008) yang menegaskan bahwa keberhasilan pembelajaran nilai sangat bergantung pada kualitas interaksi pedagogis, bukan semata pada kurikulum atau materi ajar.

Kualitas fasilitator muncul sebagai fondasi etis program, khususnya dalam menciptakan iklim pembelajaran yang dialogis, aman secara psikologis, dan reflektif. Fasilitator tidak hanya berperan sebagai penyampai materi, tetapi sebagai role model integritas yang merepresentasikan nilai-nilai anti-korupsi dalam praktik. Perspektif ini sejalan dengan teori pembelajaran sosial Reddy (2023) dan kajian (Lukmantoro et al., 2024) tentang *ethical leadership*, yang menekankan bahwa konsistensi antara nilai dan tindakan pendidik berpengaruh langsung terhadap pembentukan iklim moral dan keterbukaan peserta dalam membahas dilema etis.

Tingkat partisipasi mahasiswa terbukti menjadi mekanisme utama internalisasi nilai akuntabilitas. Keterlibatan aktif dalam diskusi, simulasi, dan refleksi memungkinkan mahasiswa membangun makna etis secara kolektif melalui interaksi sosial. Temuan ini menguatkan konstruktivisme sosial Vygotsky (1978) dan konsep *community of practice* (Lave & Wenger, 1991) yang memandang pembelajaran nilai sebagai proses sosial yang menuntut keterlibatan kognitif, afektif, dan sosial secara simultan. Partisipasi aktif berfungsi sebagai jembatan antara pengalaman belajar individual dan pembentukan norma etis kolektif.

Selain itu, relevansi materi dengan konteks kehidupan akademik mahasiswa memperkuat keterhubungan emosional dan refleksi moral terhadap nilai anti-korupsi. Penyajian kasus yang dekat dengan realitas kampus menjadikan nilai akuntabilitas tidak bersifat abstrak atau normatif, melainkan hadir sebagai persoalan moral yang nyata dan menuntut sikap konkret. Hal ini sejalan dengan pendekatan *contextual teaching and learning* (Johnson, 2002; Komalasari, 2012). Secara keseluruhan, interaksi ketiga faktor tersebut menciptakan daya transformasi program yang kuat dan menegaskan bahwa keberhasilan edukasi anti-korupsi dalam konteks pengabdian kepada masyarakat menuntut orkestrasi pedagogis yang holistik dan berkelanjutan, bukan sekadar intervensi kurikuler sesaat.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan pelatihan edukasi budaya anti-korupsi berbasis pembelajaran partisipatif, dapat disimpulkan bahwa program ini terbukti efektif dalam meningkatkan sikap akuntabilitas mahasiswa secara signifikan. Hasil pengukuran kuantitatif menunjukkan adanya peningkatan skor rata-rata Sikap Akuntabilitas Mahasiswa dari 3,42 pada pre-test menjadi 4,15 pada post-test (skala 1–5), dengan selisih peningkatan sebesar 0,73 poin yang signifikan secara statistik ($p < 0,01$). Temuan ini menegaskan bahwa intervensi tidak hanya berdampak secara kognitif, tetapi juga berhasil mendorong internalisasi nilai etika dan tanggung jawab sosial mahasiswa.

Secara lebih rinci, peningkatan terjadi secara konsisten pada seluruh indikator utama akuntabilitas, yaitu kejujuran ($\Delta = +1,1$), tanggung jawab ($\Delta = +1,1$), transparansi ($\Delta = +1,1$), serta keberanian melapor ($\Delta = +1,4$). Indikator keberanian melapor menunjukkan peningkatan tertinggi, yang merefleksikan keberhasilan program dalam mengikis budaya diam (*culture of silence*) dan meningkatkan legitimasi moral terhadap perilaku pelaporan pelanggaran. Besarnya *effect size* ($d = 1,38$) mengindikasikan bahwa pelatihan memiliki dampak substantif yang kuat terhadap perubahan sikap mahasiswa.

Analisis regresi lebih lanjut memperlihatkan bahwa tingkat partisipasi mahasiswa merupakan prediktor paling signifikan terhadap perubahan sikap akuntabilitas ($\beta = 0,28$; $p < 0,001$), sementara variabel demografis seperti jenis kelamin dan afiliasi fakultas tidak menunjukkan pengaruh yang bermakna ($p > 0,05$). Temuan ini menegaskan bahwa efektivitas pendidikan anti-korupsi lebih ditentukan oleh kualitas keterlibatan mahasiswa dalam proses pembelajaran partisipatif daripada latar belakang individual. Dengan demikian, pelatihan ini tidak hanya berhasil meningkatkan skor sikap akuntabilitas secara kuantitatif, tetapi juga memperkuat peran perguruan tinggi sebagai ruang strategis dalam pembentukan budaya integritas dan tata kelola akademik yang berkelanjutan.

Berdasarkan temuan kuantitatif tersebut, disarankan agar program edukasi budaya anti-korupsi berbasis pembelajaran partisipatif diintegrasikan secara berkelanjutan ke dalam kurikulum dan kegiatan

Pelatihan edukasi budaya anti-korupsi partisipatif sebagai strategi penguatan akuntabilitas mahasiswa di perguruan tinggi

pengembangan karakter mahasiswa. Mengingat peningkatan sikap akuntabilitas sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi, institusi perlu mendorong model pembelajaran dialogis, reflektif, dan berbasis pengalaman sebagai pendekatan utama dalam pendidikan etika dan integritas.

Selain itu, perguruan tinggi disarankan untuk memperkuat dukungan institusional melalui kebijakan kampus yang konsisten, sistem pelaporan yang aman dan terpercaya, serta keteladanan pimpinan akademik. Penelitian pengabdian selanjutnya direkomendasikan untuk menggunakan desain longitudinal guna mengukur keberlanjutan perubahan sikap dan menguji keterkaitannya dengan perilaku nyata mahasiswa dalam jangka panjang.

UCAPAN TERIMAKASIH

Tim pengabdian menyampaikan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Bumigora atas dukungan kelembagaan dan fasilitasi kegiatan ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pimpinan fakultas, para dosen pendamping, serta seluruh mahasiswa peserta yang telah berpartisipasi aktif dan menunjukkan komitmen tinggi dalam mengikuti rangkaian pelatihan. Partisipasi dan kolaborasi seluruh pihak menjadi faktor kunci keberhasilan pelaksanaan program pengabdian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Afandi et al. (2025). Peran Mahasiswa dalam Edukasi Anti Korupsi : Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Service Learning. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 22(2), 216–232.
- Ajzen & Fishbein. (1975). *Belief, Attitude, Intention, and Behavior: An Introduction to Theory and Research, Reading*, MA: Addison-Wesley.
- Aksinudin et al. (2022). Instilling anti-corruption characters in civic education for college students, 19(1), 53–64.
- Arifiyanti et al. (2022). Pendidikan Anti Korupsi pada Mahasiswa: Pendisiplinan Tubuh dan Tantangan Sengkarut Perilaku, 490–496. <https://doi.org/10.47709/educendikia.v2i3.1910>
- Berkowitz et al. (2020). The eleven principles of effective character education: A Brief History. *Journal of Character Education*, 16(2), 1–10.
- Butarbutar, A. N. (2022). Pentingnya Pendidikan Anti Korupsi Dalam Dunia Pendidikan Terkhusus Pada Perguruan Tinggi Guna Pencegahan Korupsi, 4(1), 133–139.
- Carr, D. (2023). Love , knowledge (wisdom) and justice : Moral education beyond the cultivation of Aristotelian virtuous character. *Journal of Moral Education*, 5(03), 1–19. <https://doi.org/10.1080/03057240.2023.2219029>
- Cerah, D., Hulu, A., Lase, N. K., Biologi, P., Nias, U., Biologi, P., ... Gunungsitoli, U. N. (2025). Pentingnya karakter di lingkungan kampus 1) , 02, 69–75.
- Creemers, B. P. M., & Kyriakides, L. (2008). *The dynamics of educational effectiveness: A contribution to policy, practice and theory in contemporary schools*. London: Routledge.
- Freire. (1970). *Pedagogy of the Oppressed*. New York: Continuum. New York: Continuum.
- Hadi. (2011). Pembelajaran Sosial Emosional Sebagai Dasar Pendidikan Karakter Anak Usia Dini. *Jurnal Teknodik*, 15(2), 227–240. Retrieved from <https://jurnalteknodik.kemdikbud.go.id/index.php/jurnalteknodik/article/view/104>
- Hayati et al. (2025). Student Perceptions on Developing an Anti-Corruption. *International Journal of Cultural and Social Science Published: Pena Cendekia Insani*, 6(3), 797–803.
- Hidayah, S. F., & Kuswandi, A. (2024). Implementasi Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi Studi Deskriptif di Universitas Islam 45 Bekasi, 1, 36–48.
- Irsyadi et la. (2024). Pengaruh Pendidikan Anti-Korupsi Terhadap Perilaku Generasi Muda di Indonesia. *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 09.
- Johnson. (2002). *Contextual teaching and learning: What it is and why it's here to stay*. Thousand Oaks: Corwin Press.
- Karini, L. J. (2022). Peran Perguruan Tinggi Dalam Menerapkan Pendidikan Anti Korupsi Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Di Kalangan Mahasiswa, 4(1), 156–165.

- Keng et al. (2011). Effects of mindfulness on psychological health: A review of empirical studies. *Clinical Psychology Review*, 31(6), 1041–1056. <https://doi.org/10.1016/j.cpr.2011.04.006>
- Kolb, D. A. (1984). *Experiential learning: Experience as the source of learning and development*. New York: Prentice Hall.
- Komalasari. (2012). The living values-based contextual learning to develop the students ' character. *Journal of Social Sciences*, 8(2), 246–251.
- Krettenauer, N. &. (2022). *Handbook of Moral and Character Education*. New York: Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203114896>
- Lave & Wenger. (1991). *Situated learning: Legitimate peripheral participation*. Cambridge: Cambridge: Cambridge University Press.
- Lickona. (2019). *Character Education, a complete guide to educate students to be smart and good*. Bandung: CV Nusa Media.
- Lukmantoro et al. (2024). The Principal's Leadership in Strengthening Character Education in the Digital Literacy Era: A Study at Vocational School. *IJORER: International Journal of Recent Educational Research*, 5(4), 906–918. <https://doi.org/10.46245/ijorer.v5i4.623>
- Made, N., & Dwi, S. (2022). Penguatan Nilai Karakter Serta Pembentukan Pendidikan Humanistik Melalui Penanaman Mindset Antikorupsi Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi, 4(1), 143–152.
- Nyoman, N., & Permatasari, R. (2022). Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Melalui Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi, 4(1), 108–117.
- OECD. (2018). *Education for integrity: Teaching about anti-corruption, values and the rule of law*. Paris: OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264305090-en>
- Pusvitasari et al. (2024). Peningkatan Kejujuran Akademik Pada Mahasiswa Melalui Pendidikan Anti Korupsi Putri. *Jurnal Penelitian Dan Pengukuran Psikologi*, 13(April), 17–24. <https://doi.org/http://doi.org/10.21009/JPPP.131.03>
- Ramadhan, F. N. (2020). Values Of Kedempling Dance In Social Science Learning Based On Behavioristic Learning Theory. *Journal of Theory and Praxis of Learning Social Sciences*, 5(2), 114–124.
- Reddy, L. A. (2023). Advancing the science of coaching in education: An introduction to the special issue. *Journal of School Psychology*, 96(December 2022), 36–40. <https://doi.org/10.1016/j.jsp.2022.10.003>
- Suhandi, M. F., & Agustin, S. (2023). Pendidikan Anti Korupsi Pada Jenjang Perguruan Tinggi, 01(01), 19–27.
- Tang. (2015). *Global citizenship education: topics and learning objectives*. *Global citizenship education: topics and learning objectives*. <https://doi.org/10.54675/drhc3544>
- Tsoraya et al. (2023). Pentingnya Pendidikan Karakter Terhadap Moralitas Pelajar di Lingkungan Masyarakat Era Digital. *Literaksi: Jurnal Manajemen Pendidikan e-ISSN: xx(xx)*, 7–12.
- UNESCO. (2021). *Digital citizenship education: Competencies for the digital age*. Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Retrieved from <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374938>
- UNESCO. (2024). *Global citizenship education in a digital age: Teacher guidelines*. paris: UNESCO.
- Vygotsky. (1978). *Mind in society: the development of higher psychological processes*. Cambridge,MA: Harvard University Press.
- Witarsa. (2023). Optimizing Anti-Corruption Education in Higher Education : Enhancing Awareness and Promoting Action against Corruption among University Students. *Journal of Social Work and Science Education*, 4(3), 897–905.